

Sesudah P.P. 10 / 1959: Negosiasi Identitas para *Guiguo Hoaqiao* (*Guiqiao*) Generasi Pertama Asal Indonesia di Komune Yingde, Guangdong, RRC

DRAFT

Dave Lumenta
Dept. Antropologi
FISIP UI - Universitas Indonesia

Abstrak

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 telah menjadi sebuah *fait accompli* yang menyebabkan sekitar 119,000 etnis keturunan Tionghoa perantauan (*hoaqiao*) di Indonesia melakukan repatriasi ke Republik Rakyat Cina (RRC) antara 1960-61. Ini kemudian diikuti dengan repatriasi susulan akibat gejolak politik 1965-66. Dari perspektif kedua negara, repatriasi ini selalu dibingkai dalam istilah ‘pemulangan’ maupun ‘kepulangan’. Reduksi makna ‘pulang’ mengandaikan bahwa seseorang kembali ke ‘rumah’ dari sebuah tempat yang asing, atau tempat di mana seseorang tidak sepatutnya berada. Bagi para *hoaqiao* generasi pertama, persoalannya tidak semudah itu. Narasi maupun praksis kedua negara selama lebih dari 50 tahun tentang di mana para *hoaqiao* ini sepatutnya harus merasa ‘di rumah’ menyediakan konteks negosiasi identitas bagi para *hoaqiao* generasi pertama yang belum selesai hingga hari ini.

Pendahuluan

Leo Suryadinata (1992) pernah menggolongkan etnis Tionghoa di Indonesia ke dalam dua golongan besar. Kategori pertama adalah mereka yang dikategorikan sebagai *Cina Peranakan* yang dianggap telah menetap selama paling tidak 4 hingga 5 generasi dan telah melalui proses asimilasi budaya maupun perkawinan dengan penduduk ‘pribumi’. Kategori kedua adalah apa yang disebut Suryadinata sebagai *Cina Totok* yang dianggap sebagai pendatang yang lebih baru dan masih kuat mempertahankan adat, bahasa maupun orientasi keterikatan dengan Cina.

Pada saat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung (1955), Perdana Menteri Republik Rakyat Cina (RRC) Zhou Enlai bertemu Sukarno untuk membicarakan nasib kewarganegaraan para *hoaqiao* (etnis Tionghoa perantauan di luar wilayah Cina) di Indonesia. RRC menyadari bahwa banyak keturunan Tionghoa di Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan dan mendesak kepada Sukarno untuk segera memperjelas status mereka ke dalam dua opsi: menjadi warganegara Indonesia atau RRC. Desakan RRC ini juga terkait dengan upaya mencari legitimasi

internasional sebagai negara pewaris (*successor state*) dari pemerintah Dinasti Qing (berkuasa hingga 1911) maupun pemerintah nasionalis Republik Cina (Republic of China/ROC) yang berhasil ditumbangkan oleh Partai Komunis Cina (PKC) dalam revolusi Oktober 1949. Pemerintah Dinasti Qing berpendirian bahwa semua *hoaqiao* adalah subyek kekuasaannya (*governing subjects*). Terpecahnya Cina dalam dua entitas negara sesudah Oktober 1949, ditandai dengan pendirian RRC di wilayah Cina daratan dan mengungsinya pemerintahan nasionalis ROC ke Taiwan, berimplikasi pada persaingan keduanya untuk merebut loyalitas politik dari para *hoaqiao* yang tersebar di Asia Tenggara.

Konteks Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 10 / 1959 dan Implementasinya

Status kewarganegaraan para *hoaqiao* di Indonesia antara 1950-1959 sangat bervariasi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengategorikan para *hoaqiao* di wilayahnya sebagai ‘orang Timur Asing’ (*vreemde oosterlingen*). Pada saat tumbangnya pemerintahan ROC di daratan Cina pada tahun 1949, status kewarganegaraan para *hoaqiao* bervariasi, antara yang memilih kewarganegaraan WNI, yang memilih kewarganegaraan ROC (Taiwan sejak 1949), yang memilih kewarganegaraan RRC (sejak 1949), dan yang belum menentukan sikap, atau secara teknis tergolong *stateless*.

Peraturan Presiden No. 10 / 1959 (P.P. 10/1959) “Peraturan Presiden tentang larangan bagi usaha perdagangan ketjil dan etjeran jang bersifat asing diluar ibukota Daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidenan” berimplikasi pada keharusan bagi para *hoaqiao* yang belum memiliki kewarganegaraan untuk memilih menjadi WNI atau tetap menjadi WNA. Di balik itu, P.P. 10/ 1959 dapat juga dilihat sebagai sebuah *fait accompli* untuk menggeser peran para *hoaqiao* dari sektor-sektor perekonomian di daerah. Pengusaha pribumi maupun penguasa militer di banyak daerah memiliki kepentingan ekonomi sejak hengkangnya para perusahaan Belanda / asing saat perekonomian Indonesia dinasionalisasi pada tahun 1957. Tidak adanya perundang-undangan yang jelas menyangkut status aset ekonomi para WNA di daerah menjadi celah bagi *fait accompli* para penguasa militer untuk mempersulit alih status warga Tionghoa menjadi WNI, dan membuka kesempatan bagi penyitaan aset-aset ekonomi milik para *hoaqiao* untuk pengusaha pribumi & militer. Bagi mereka yang belum

menjadi WNI, status harta / aset ekonomi menurut P.P.10/ 1959 akan diatur dalam perundang-undangan. Bagi mereka yang berhasil menjadi WNI, aset ekonomi diperlakukan selayaknya seperti WNI lainnya.

Jawa Barat adalah wilayah di mana implementasi PP No. 10/1959 dilakukan secara radikal oleh penguasa militer (Kol. Kosasih) yang mempersulit diberikannya kesempatan alih status kewarganegaraan bagi warga Tionghoa untuk menjadi WNI. Penguasa militer di Jawa Barat memilih untuk melakukan pengusiran sepihak warga Tionghoa dari wilayah-wilayah Kabupaten dengan tenggat waktu 29 Desember 1959. Bagi mereka yang belum keluar pada saat deadline ini dilakukan tindakan penyitaan aset dan pengusiran.¹

Keberangkatan Gelombang Pertama Hoaqiao ke Cina (1960-61)

Pengumuman PP No. 10/1959 kepada masyarakat Tionghoa dilakukan antara lain melalui rapat-rapat pertemuan antara aparat pemerintah dengan wakil-wakil organisasi-organisasi / kongsi Tionghoa yang ada di masing-masing daerah, atau melalui pemberitahuan langsung di kantor-kantor pemerintah yang terkait dengan urusan kependudukan.² Beberapa koran lokal menurunkan berita tentang pemberlakuan PP No. 10 / 1959, misalnya Harian Merdeka di Semarang yang menurunkan berita “Warganegara Asing Tidak Boleh Berdjualan” atau berita tentang anjuran pemerintah bagi etnis Tionghoa agar memiliki “Paspor Tiongkok Baru”.

Berdasarkan wawancara di Yingde (Yin Tak), memang konteks kedaerahan implementasi PP No. 10/1959 menjadi berbeda-beda, bukan hanya karena konteks kebijakan penguasa lokal setempat (mis. pengaruh militer di Jawa Barat) yang berbeda-beda, namun juga status kewarganegaraan Huaqiao yang berbeda-beda, dan juga ekspresi anti-Tionghoa yang juga berbeda-beda di tiap daerah asal.

¹ Lihat Mozingo (1976).

² Untuk kasus di Semarang, informasi diperoleh dari wawancara dengan Gunawan Chen (Tan Tjin Gwan / Chen Zhen De), Yingde, Guangdong, Desember 2011.

Kasus Pak Gunawan Chen memberi indikasi bahwa militer tidak terlibat secara terbuka, namun tetap ada paksaan bagi warga Tionghoa yang berada di Kuwu (Kabupaten Grobogan) untuk pindah ke Semarang, terutama bagi mereka yang masih memiliki sanak keluarga di sana. Generasi Pak Gunawan adalah tipologi warga Tionghoa yang *'stateless'* yang biasanya disebabkan orangtua yang tidak pernah mengurus / meng-update kewarganegaraan resmi (Kewarganegaraan Cina Kuomintang atau, sejak 1949, kewarganegaraan RRC). Keluarga Pak Gunawan memiliki KTP yang menyebutkan bahwa mereka adalah 'warganegara asing'. Ketika PP No. 10/1959 keluar, mereka memilih untuk menjadi warganegara RRC (karena konsulat RRC-lah yang paling aktif mengajak para warga keturunan untuk melakukan naturalisasi, dan bukan konsulat Cina Kuomintang / Taiwan). Dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki keluarga Pak Gunawan menunjukkan stempel pencabutan pemberlakuan yang secara eksplisit mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali ke Indonesia.³

Kasus Pak Sip asal Bangka juga hampir serupa. Ayah pak Sip adalah seorang Hakka asal Kwantung (Guangdong) yang pada 1920-an mencari kerja pada pertambangan timah di Pulau Bangka. Keluarga Pak Sip sejak awal menolak untuk menjadi WNI, dan sebagai akibatnya, mereka memilih untuk menjadi warganegara RRC ketika PP10 diumumkan. Pengurusan paspor RRC dilakukan melalui Kedutaan RRC di Djakarta, dan sebagai syarat untuk bertolak ke luar Indonesia, mereka diwajibkan membayar pajak penghasilan yang dibayar di muka (fiskal) dengan harga yang tergolong tinggi pada masa itu (misalnya Rp. 3,750 per tahun untuk seorang pensiunan buruh tambang).⁴

Selain karena anjuran (atau desakan) aparat-aparat pemerintah maupun militer Indonesia, pertimbangan para Hoaqiau untuk 'pulang' ke RRC juga terbentuk oleh isi siaran radio Peking (Xinhua / *New China News Agency*) yang mengudara selama dua minggu sejak 10 Desember 1959 yang mengundang para Hoaqiau untuk pulang.

³ Wawancara dengan Gunawan Chen (Tan Tjin Gwan / Chen Zhen De), Yingde, Guangdong, Desember 2011. *Exit Permit*, atau izin untuk bertolak ke luar negeri bagi WNI dari pihak Direktorat Jenderal Keimigrasian adalah kebijakan yang berlaku hingga 1988.

⁴ Wawancara dengan Gunawan Chen, Yingde, Guangdong, Desember 2011.

Ajakan pulang ini juga dengan aktif disampaikan oleh kantor-kantor konsulat RRC di seluruh Indonesia.⁵

Di sisi lain, para repatrian hoaqiao yang bertolak ke RRC pada awal 1960 telah mengirim berita melalui surat untuk keluarga mereka yang masih menunggu gelombang pemberangkatan berikutnya. Mozingo (1976) maupun Gunawan Chen melaporkan bahwa banyak surat memberitahukan kesulitan kondisi di RRC dan anjuran supaya anggota keluarga maupun teman-teman di Indonesia agar tidak perlu menyusul. Sebagai akibatnya, ada sebagian calon repatrian yang mengurungkan niatnya (dan misalnya memilih repatriasi ke Taiwan atau Hong Kong). Namun sebagian besar percaya bahwa situasi di RRC tidak akan lebih buruk dibandingkan situasi di Indonesia dan memilih untuk tetap ‘dipulangkan’ ke RRC.

Data keimigrasian di Indonesia pada pertengahan 1961 mencatat bahwa jumlah total ‘warga RRC’ yang diberangkatkan dari Indonesia ke RRC sejak 1960 berjumlah sekitar 119,000 orang, ditambah 17,000 yang memilih ‘pulang’ ke Taiwan.⁶ Menurut Mozingo (1976), keberangkatan para Hoaqiao ke RRC dilakukan melalui dua skema.

Skema pertama adalah skema yang dikoordinir oleh kedutaan maupun konsulat-konsulat RRC yang ada di Indonesia. Pemerintah RRC mengkoordinir penjemputan kapal antara Januari 1960 hingga April 1961. Keterbatasan jumlah kapal yang dimiliki RRC (terutama karena kapal-kapal RRC belum mendapat pengakuan dan izin berlabuh di banyak negara) menyebabkan RRC pada awalnya menyewa kapal-kapal milik Uni Soviet. Secara total, RRC hanya mengirim empat kapal untuk misi penjemputan. Pak Chen Gunawan yang berangkat dari Semarang pada bulan November 1960 mengingat bahwa kapal yang ditumpangi keluarganya adalah kapal Rusia (Uni Soviet) yang bernama ‘Golose’.⁷ Menurut para informan, pendaftaran untuk mengikuti kapal dilakukan secara bersamaan dengan aplikasi permohonan paspor pada konsulat RRC terdekat, atau kedutaan RRC di Jakarta.⁸ Para calon penumpang tidak perlu memegang tiket, tapi cukup datang ke pelabuhan sesuai

⁵ Lihat Mozingo (1976:171)

⁶ Lihat Mozingo (1976:175)

⁷ Perjalanan kapal Golose: Semarang - Belawan (Medan) - Singapore - Hongkong - Huangpu (Wangpo).

⁸ Hal senada diungkapkan Pak Sip. Menurut dia, ayahnya mengurus paspor RRC ke kedutaan RRC di Jakarta di mana pendaftaran untuk naik kapal juga dilakukan. Mereka berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok. Wawancara dengan Tjen A Sip, Yingde, Guangdong, Desember 2011.

jadwal dan mengkonfirmasi diri mereka ke daftar penumpang yang dipegang oleh wakil-wakil konsulat yang hadir di pelabuhan pada saat pemberangkatan.⁹ Menurut para informan, mereka mengalami pembatasan barang bawaan yang boleh dibawa sebatas apa yang bisa mereka bawa sendiri. Karena pengiriman kontainer tidak diperbolehkan, masing-masing keluarga hanya sanggup membawa peti (kurang lebih 1m kubik) atau kontainer yang terbuat dari drum minyak, disamping *hand luggage*. Barang yang biasanya dibawa adalah peralatan dapur, pakaian, dokumen-dokumen penting dan *mementos* seperti foto keluarga dsb. Menurut Pak Gunawan, penyediaan peti-peti dan transportasinya ke pelabuhan (termasuk ongkos handling kuli) dikoordinir oleh organisasi-organisasi Tionghoa. Di Yingde, hampir semua hoaqiao gelombang pertama adalah mereka yang mengikuti skema pertama ini.

Skema kedua adalah skema di mana para calon repatrian membeli tiketnya sendiri untuk kapal-kapal komersial yang menuju ke Hong Kong. Dari Hong Kong mereka akan berganti naik kereta api yang membawa mereka ke Kanton (Guangzhou). Mozingo (1976) mengungkapkan bahwa mayoritas dari repatrian ke RRC mengikuti skema ini karena keterbatasan daya angkut kapal-kapal yang dikirim pemerintah RRC.

Salah satu kapal terakhir yang dikirim oleh pemerintah RRC untuk misi penjemputan adalah kapal *Guanghua* yang pada saat itu baru dibeli oleh pemerintah RRC. Kapal *Guanghua* tiba di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1961 untuk menjemput 1,500 repatrian Hoaqiao dan sampai kembali di pelabuhan Huangpu (Wangpo) pada tanggal 17 Mei 1961.¹⁰

Pada pertengahan 1960 pemerintah RRC sudah melihat bahwa proses repatriasi para hoaqiao (untuk mereka yang sudah ‘kembali’ ada istilah *guiqiao* atau ‘perantau yang sudah kembali’) membebani anggaran mereka. Di samping itu, pemerintah RRC memutuskan untuk menghentikan repatriasi setelah mengamati bahwa mayoritas hoaqiao dari Indonesia berprofesi sebagai pedagang maupun penyedia sektor jasa

⁹ Wawancara dengan Pak Gunawan Chen, Yingde, Guangdong, Desember 2011. Lihat juga www.ccs.org.cn/en/50celebrate/huihuang/001.htm, diakses 20 Desember 2012.

¹⁰ Kapal *Guanghua* adalah kapal Inggris yang semula bernama *Slaby* yang dirakit di galangan kapal Belfast pada tahun 1930. Karena waktu tempuh kapal ini dari Huangpu ke Jakarta hanya memakan 6 hari, dan waktu tempuh dari Jakarta kembali ke Huangpu memakan 14 hari, ada kemungkinan bahwa kapal ini juga mampir ke Belawan untuk menjemput repatrian lainnya. Lihat www.ccs.org.cn/en/50celebrate/huihuang/001.htm, diakses pada 20 Desember 2013.

yang rata-rata berumur lanjut. Industrialisasi di era *The Great Leap Forward* (1958 - 1962) membutuhkan tenaga-tenaga muda dengan fisik prima untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan siap pakai untuk industri dan pertanian, seperti petani, peternak, montir/mekanik, tukang las, tukang kayu, tukang konstruksi bangunan dan sebagainya. Di samping itu, pemerintah RRC tidak ingin membuka konflik terlalu lebar dengan Pemerintahan Sukarno pada masa itu, dan program repatriasi yang memberi kesan bahwa pemerintah RRC 'ngambek' terhadap kebijakan PP No. 10 / 1959 di Indonesia digantikan dengan kebijakan untuk meyakinkan sisa hoaqiao yang belum terangkut agar memilih kewarganegaraan R.I., atau minimal bertahan hingga kondisi di RRC sendiri cukup ideal bagi proses repatriasi.¹¹

Penyesuaian Para Hoaqiao dan Konteks RRC 1960-1966

Situasi RRC 1960-1966

Pada tahun 1958, Mao berambisi mengubah RRC dari sebuah negara agraris menjadi negara industri sosialis. Untuk mencapai ambisi ini, Mao menginisiasi program *The Great Leap Forward* (大躍進) antara tahun 1958 hingga 1961. Untuk ini, seluruh rakyat dimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik di bidang industri maupun pertanian (sebagai sub-sektor pendukung industri). Di pedesaan, PKC mewajibkan kolektivisasi pertanian (tanah tidak lagi dimiliki petani tapi dimiliki secara kolektif) demi menggenjot output produksi pangan seperti gandum dan beras. Di wilayah pedesaan juga, seluruh warga diminta untuk mengumpulkan besi-besi bekas (dari apapun) untuk kemudian dilebur untuk keperluan industri. Di wilayah pedesaan diberlakukan sistem administrasi Hukou (戶口), semacam sistem RT/RW yang tidak memperbolehkan warga keluar dari desanya tanpa pas Hukou (internal passport).¹² Perencanaan *The Great Leap Forward* yang sangat sentralistik membawa bencana ekonomi yang meluas. Takut dicap sebagai birokrat yang gagal, banyak

¹¹ Lihat Mazingo (1976).

¹² Ini menyebabkan mobilitas dan komunikasi menjadi sangat terbatas. Sistem Hukou terkait erat dengan pemenuhan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan warga, karena kupon-kupon seperti kupon untuk membeli beras/gandum, minyak, rokok dan sebagainya hanya dikeluarkan dan berlaku di wilayah di mana seseorang terdaftar sebagai warga.

fungsi partai yang bertanggungjawab atas produksi pertanian di tingkat bawah melaporkan hasil-hasil panen yang fiktif. Implikasinya, wilayah yang dilaporkan 'berhasil' dalam panen dianggap cukup mandiri untuk tidak menerima subsidi bantuan pangan dari pemerintah pusat. Sebagai akibatnya, banyak wilayah yang sebenarnya gagal panen semakin tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, dan pada akhirnya bencana kelaparan meluas.¹³ Bencana kelaparan dan kesulitan ekonomi ini adalah kondisi yang menyambut kedatangan para hoaqiao dari Indonesia pada tahun 1960.

Kedatangan Para Hoaqiao di Yingde

Pada saat kedatangan di Huangpu, para hoaqiao (semua asal Indonesia) dikumpulkan dan diharuskan melaporkan barang-barang bawaan mereka. Para hoaqiao kemudian dikumpulkan berdasarkan wilayah asal mereka untuk kemudian diberangkatkan ke Shoukuan untuk kemudian dibagi lebih lanjut dengan truk-truk yang akan membawa mereka ke komune-komune (unit kolektivisasi pertanian) yang telah ditentukan. Mayoritas komune yang dipersiapkan bagi para hoaqiao terletak di provinsi-provinsi di sebelah selatan RRC seperti Yunnan, Guangdong, Guangxi.

Karena sebagian besar para hoaqiao tidak bisa berbahasa Putonghoa, yang bertindak selaku alih bahasa adalah para hoaqiao asal Malaya yang telah terlebih dahulu direpatriasi. Di Yingde, kelompok hoaqiao yang datang pertama adalah para eks-gerilyawan MNLA (Malayan National Liberation Army - sayap militer dari Malayan Communist Party) yang diusir oleh pemerintah kolonial Inggris di Malaya.¹⁴ Pada saat kedatangan di Yingde, para hoaqiao Indonesia yang sebagian besar berasal dari Jawa dan Sumatra tinggal berkelompok dan membentuk kluster-kluster pemukiman sesuai lokasi asal (mis. Kampung Solo, Kampung Yogya, dsb.)

Kejutan pertama yang dihadapi para hoaqiao asal Indonesia, terutama di Yingde, adalah iklim sub-tropis yang berbeda dengan Indonesia. Kedatangan mereka pada bulan November (transisi musim gugur ke musim dingin) mengagetkan mereka akan dinginnya suhu, dan kenyataan bahwa pergerakan matahari pada musim gugur & musim dingin menyebabkan siang yang pendek. Jam biologis mereka menjadi kacau

¹³ Li, Wei, and Dennis Tao Yang (2005). *The Great Leap Forward: Anatomy of a Central Planning Disaster*. *Journal of Political Economy* 113 (4), pp. 840-877.

¹⁴ Wawancara dengan Lim Kok Kiong, eks gerilyawan MNLA, Yingde, Guangdong, Desember 2011.

balau. Kebanyakan hoaqiao datang dengan mengenakan pakaian necis yang cocok untuk iklim tropis (pantalon, kemeja lengan pendek, rok dan/atau sarung kain batik). Melihat kondisi iklim dan kenyataan bahwa hampir seluruh penduduk asli di sekitar Yingde mengenakan pakaian bekerja yang lusuh dan tebal-tebal menyebabkan mereka cukup 'shock' melihat kondisi pekerjaan dan iklim yang akan mereka hadapi.

Pada saat kedatangan, para hoaqiao dibagikan sepasang pakaian kerja, topi dan jaket tebal dengan *padding* kapuk, dan rumah-rumah pekerja berukuran 6 x 3 meter yang cukup dihuni satu keluarga inti (sepasang orangtua dan anak) yang terbuat dari tanah lempung berwarna kuning. Selama minggu pertama mereka mengamati pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh warga yang sudah terlebih dahulu bermukim dalam komune. Pekerjaan utama yang akan mereka hadapi adalah menjadi buruh perkebunan yang menanam komoditas teh, jagung dan sayur-sayuran. Di samping itu, ada juga pekerjaan menggembalakan ternak, terutama hewan ternak yang dipakai untuk membajak tanah ladang. Skill sebagai petani dan peternak diajarkan oleh Ketua Komune dan warga yang sudah terlebih dahulu tinggal di Yingde. Minggu-minggu awal adalah masa penderitaan bagi sebagian besar hoaqiao karena mereka belum terbiasa bekerja fisik dari pagi hari hingga larut malam. Para Huaqiao merasa tidak siap secara psikologis dengan pekerjaan-pekerjaan pertanian maupun kerja kasar industri, terutama bagi mereka yang di Indonesia hanya mengenal pekerjaan-pekerjaan non-fisik di sektor jasa atau perdagangan. Rasa frustrasi dan stress mulai hinggap melalui sikap mudah marah/emosi dan hampir seluruh anggota keluarga yang sering menangis jika mengingat kondisi mereka di Indonesia yang relatif lebih baik. Kebanyakan hoaqiao yang telah sampai di Yingde berkeras untuk membujuk sanak keluarga mereka untuk tidak menyusul mereka selama kondisi mereka di RRC belum membaik. Beberapa orang telah menciptakan sandi-sandi / kode untuk dikirimkan ke keluarga mereka di Indonesia melalui surat. Karena sadar surat-surat ini kemungkinan besar akan disensor, mereka, misalnya, menyepakati bahwa jika surat itu ditandatangani dalam huruf kanji, itu adalah pertanda bahwa kondisi belum baik. Kode serupa juga mereka sepakati saat mengirim foto. Jika para hoaqiao berpose duduk, maka itu adalah tanda bahwa kondisi di RRC juga belum membaik (meski kesempatan untuk berfoto sangat terbatas).¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Pak Gunawan dan Pak Sie, Yingde, Guangdong, Desember 2011.

Pemerintah RRC melihat para Hoaqiau pada umumnya dengan curiga karena mereka dianggap memiliki 'dosa-dosa kelas' yang tercemar oleh budaya feodal-kapitalis di Asia Tenggara - jadi tekanan yang dialami oleh para Hoaqiau bukan hanya beban pekerjaan yang semakin berat dalam kondisi ekonomi yang sulit, tapi juga indoktrinasi di mana mereka dipaksa untuk menanggalkan sisa-sisa budaya, pola pikir, mental dan sikap yang oleh pemerintah RRC dianggap sebagai feodal (seperti individualisme, romantisme akan masa lalu, perilaku mencari untung, dsb). Sistem Hukou (yang berlaku hingga tahun 1990an) menyebabkan mobilitas dan akses komunikasi bagi para huaqiao Indonesia menjadi sulit, terutama akses ke daerah perkotaan.

Pada tahun-tahun awal di Yingde, para hoaqiao ikut mengumpulkan dan melebur besi-besi bekas. Terbatasnya komunikasi juga menyebabkan mereka tahu sedikit tentang kejadian-kejadian (mis. bencana kelaparan) yang terjadi di luar komune, kecuali mereka yang mendapatkan kesempatan untuk ke kota jika ditugaskan untuk mengambil suplai atau mengantar hasil panen ke pusat distribusi/logistik milik negara.

Semua keperluan hidup disediakan oleh komune dalam bentuk kupon-kupon ransum untuk membeli beras, minyak tanah, teh, rokok dan sebagainya. Selain itu, apa yang dimakan oleh masing masing keluarga cukup seragam, karena mengandalkan jatah makan (seperti sayuran, daging babi, dsb.) yang semuanya dikoordinir oleh pengurus perkebunan. Setiap keluarga tidak boleh menikmati sendiri hasil dari apa yang ditanaminya karena seluruh tanah perkebunan adalah milik negara, dan seluruh hasil perkebunan, seperti ubi, ubi jalar, tebu dan kacang tanah harus diserahkan kepada pengurus perkebunan untuk dibawa ke pusat-pusat logistik yang dimiliki oleh negara. Para hoaqiao hanya disuruh menanam komoditas yang tumbuh dengan mudah yang membutuhkan sedikit skill maupun pengetahuan pertanian. Produksi padi di sekitar Yingde ditangani oleh warga lokal Hakka setempat yang memang sebagian besar adalah petani sawah. Kontak sosial dengan warga Hakka setempat pada awalnya memang berlangsung minim karena kesulitan berbahasa, ditambah rasa malas para hoaqiao untuk bergaul dengan masyarakat asli setempat yang dianggap tak berpendidikan dan jorok. Selama tahun pertama di Yingde, semua hoaqiao hanya makan kangkung sebagai sumber sayuran, dan sebagai akibatnya, banyak hoaqiao, terutama anak-anak, menderita bengkak-bengkak seperti beri-beri di leher mereka.

Secara umum, para hoaqiao melaporkan bahwa kondisi makanan sangatlah buruk hingga tahun 1963.

Anak-anak umur sekolah wajib mengikuti sekolah yang disediakan dengan cuma-cuma oleh negara. Beberapa hoaqiao yang memiliki bakat dan pengetahuan sebagai guru diperbolehkan untuk mengajar di sekolah. Anak-anak yang

Hingga awal dekade 1980-an, para hoaqiao tidak boleh melakukan pekerjaan lain selain apa yang telah ditetapkan oleh pengurus Komune. Kegiatan berdagang, misalnya, baru bisa mereka lakukan dalam skala kecil-kecilan sejak awal 1980-an. Pemandangan tugas, seperti meminta pekerjaan di kota, juga sulit dilakukan, mengingat bahwa sistem Hukou membatasi pemberian dan pemberlakuan kupon ransum makanan dan sebagainya yang hanya berlaku di Yingde.

Hoaqiao dalam Konteks Revolusi Kebudayaan / 文化大革命 (1966-1976)

Situasi RRC 1966-1976

Kegagalan *The Great Leap Forward* dan penanganannya memancing para fungsionaris garis keras (atau dikenal dengan *The Gang of Four/GoF*) dalam PKC untuk mendesak Mao untuk kembali memurnikan arah pembangunan RRC sesuai ajaran komunisme (dalam hal ini, ajaran Mao sendiri yang tertuang dalam buku merah). Menurut GoF, kegagalan *The Great Leap Forward* adalah masih kuatnya sisa-sisa budaya feodal dan kapitalis dalam masyarakat RRC - dan sebuah *Revolusi Kebudayaan* diperlukan untuk memperkuat militansi budaya ajaran komunis. Kegagalan *The Great Leap Forward* dipakai oleh anggota GoF untuk mendiskreditkan para politisi maupun ekonom moderat (seperti Liu Xiaoxi, Deng Xiaoping, Hua Guofeng, Zhou Enlai) sebagai penyabot dan antek kapitalis. GoF memulai pembersihan internal besar-besaran dalam PKC, tapi karena belum yakin akan dukungan tentara pada usaha mereka (terutama karena Zhou Enlai adalah salah satu sesepuh tentara), mereka memobilisasi secara massal para mahasiswa hingga siswa sekolah sebagai kekuatan tandingan untuk menjaga kemurnian ajaran Mao dan revolusi komunis Cina - dan terbentuklah kelompok paramiliter Pengawal Merah (*Red Guards / 红卫兵/hongwe pin*) di seluruh RRC, dari Beijing hingga pelosok

pedesaan.¹⁶ Para Pengawal Merah, yang mayoritas terdiri dari pemuda berumur 17-25 tahun, menjadi kekuatan saingan dari birokrasi partai maupun tentara, dan dalam periode 1966-69 lebih berkuasa di pedesaan dan perkotaan daripada para fungsionaris PKC sendiri.

Para Pengawal Merah menjalankan fanatisme dan kultus individu Mao dalam setiap relung kehidupan di RRC, dari ruang publik hingga ruang privat. Setiap orang wajib memiliki, membawa, mengerti dan menghafal ajaran-ajaran Mao yang tertuang dalam buku merah *Kutipan dari Ketua Mao (Quotations from Chairman Mao/ 毛主席语录)* dan para Pengawal Merah aktif merazia jalanan, kereta api, kantor dan bahkan setiap rumah untuk memeriksa apakah setiap penduduk memiliki buku tersebut. Selain itu, para Pengawal Merah secara aktif mencari siapapun yang dianggap sebagai musuh Ketua Mao dan Partai, yaitu siapapun yang dianggap memiliki karakter feodal ('kaum reaksioner'), kapitalis, atau sikap pro-Amerika dan/atau pro-Uni Soviet ('kaum revisionis').¹⁷ Para Pengawal Merah secara spesifik mendefinisikan 'penyakit' ideologi yang harus dibasmi, yaitu kapitalisme (seperti ciri individualisme, hak milik perseorangan, sikap mencari profit) dan ciri feodalisme (romantisme pada masa lalu, tradisi konghucu, praktek-praktek keagamaan seperti buddhisme/kristen/islam, kemalasan bekerja, kegandrungan pada hirarki sosial/status). Sebagai akibatnya, kegiatan berdagang, bersembahyang, kegiatan menyanyikan lagu-lagu non-revolusioner, kegiatan membaca buku-buku non-revolusioner, kritik terhadap Mao dan kebijakannya maupun setiap sikap yang dianggap sebagai kemalasan (misalnya kegagalan memenuhi kuota produksi, kegagalan bekerja) adalah 'dosa-dosa' yang sanksinya dapat berupa teguran, keharusan melakukan otokritik sebagai hukuman di depan umum, sanksi administratif, sanksi untuk mengikuti proses indoktrinasi ulang, hukuman penjara, hukuman fisik, bahkan sampai hukuman mati. Para Pengawal Merah terkenal menjatuhkan hukuman secara arbitrer (semaunya). Tindakan menempeleng seseorang di ruang publik yang ketahuan tidak membawa buku merah Mao adalah pemandangan sehari-hari selama masa radikal revolusi kebudayaan (1966-69). Anak-anak sekolah pun diindoktrinasi agar menjadi militan dan hanya

¹⁶ Lihat MacFarquhar & Schoenhals (2006), *Mao's Last Revolution*. Massachussets: Belknap Press of Harvard University Press.

¹⁷ Sejak 1960, RRC menganggap Uni Soviet sebagai musuh ideologis yang lebih berbahaya dari Amerika Serikat.

diperbolehkan mempelajari ajaran-ajaran Mao, dan mereka dididik agar punya loyalitas tunggal ke Ketua Mao. Banyak anak sekolah, dari umur SD, yang diminta untuk memata-matai tingkah laku orangtua mereka sendiri dan melaporkan jika ada ucapan atau tindakan orangtua mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Mao. Setiap warga diminta untuk memata-matai tetangganya sendiri untuk melaporkan jika ada pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Mao. Di tempat kerja, para buruh atau petani harus melaporkan jika di antara mereka ada yang melanggar ajaran Mao. Doa-doa keseharian pada leluhur atau Tuhan harus digantikan dengan permohonan yang ditujukan pada Ketua Mao. Singkat kata, seluruh kehidupan keseharian rakyat RRC diradikalisasi selama berlangsungnya revolusi kebudayaan, dan Mao diperlakukan seperti dewa yang tidak pernah salah. Pengaruh Pengawal Merah mulai mengendur di tahun 1969 ketika kekacauan situasi yang mereka akibatkan mulai ditentang oleh para petinggi tentara RRC. Mao kemudian menyuruh para Pengawal Merah untuk menghentikan aksi-aksi radikalnya dan meminta mereka untuk ‘turun ke bawah’ ke wilayah pedesaan untuk belajar tentang kehidupan pedesaan dari para petani. Bagi para Pengawal Merah, turun ke pedesaan adalah sebuah ‘libur panjang’ yang mereka nikmati karena sekolah, universitas maupun kolese selama revolusi kebudayaan terhenti aktivitasnya hingga pertengahan 1970an.¹⁸ Kultus individu (*cult of personality*) melalui foto/lukisan maupun kutipan ucapan Mao memenuhi ruang-ruang publik. Foto-foto Mao ada dalam setiap rumah, kantor, sekolah dan tempat kerja. Ucapan Mao menjadi wajib untuk dikutip oleh siapa pun yang berbicara dalam ruang publik (pidato, rapat, pertemuan). Antara tahun 1969-71, foto Mao selalu dibarengi dengan foto Lin Biao yang dijagokan oleh GoF untuk menjadi calon pengganti Mao yang sudah mulai menua dan sakit-sakitan. Dominasi GoF mulai mengendur sejak 1971 ketika Lin Biao diduga terlibat dalam usaha makar melawan Mao. Di samping itu, usaha Mao untuk memfokuskan diri pada perbaikan hubungan RRC dengan Amerika Serikat (untuk mengimbangi permusuhan RRC dengan Uni Soviet) dan usaha menormalisasi keadaan ekonomi pasca-kekacauan Revolusi Kebudayaan menyebabkan peran Zhou Enlai (dan pendukungnya yang moderat, di antaranya Deng Xiaoping, Hua Guofeng, dsb) lebih dipentingkan dibandingkan peran GoF. Pada tahun 1974, Zhou Enlai mengusulkan kebijakan *Four Modernizations* sebagai arah kebijakan pembangunan RRC (yang di kemudian hari akan

¹⁸ Mobo Gao, 2008. *The Battle for China's Past: Mao and the Cultural Revolution*. London: Pluto Press.

diimplementasikan Deng Xiaoping) untuk menggantikan radikalisme kebijakan pada masa Revolusi Kebudayaan. Pada awal tahun 1976 Zhou Enlai meninggal. Kecintaan rakyat RRC pada Zhou Enlai sebagai tokoh moderat PKC terbukti dengan jutaan pelayat yang memenuhi Lapangan Tiananmen (atau sering disebut sebagai Insiden Tiananmen I). Hampir seluruh rakyat RRC menyempatkan diri untuk secara swadaya pergi ke Beijing untuk melayat, meski ada larangan yang dikeluarkan oleh GoF yang sejak dulu tidak pernah suka dengan gaya moderat Zhou Enlai. Tidak diindahkannya himbuan GoF, ditambah dengan penunjukkan Hua Guofeng (yang juga berasal dari kubu Zhou Enlai) oleh Mao sebagai calon penggantinya adalah akhir dari pengaruh GoF, dan juga akhir dari dominasi mereka dalam merancang kebijakan-kebijakan Revolusi Kebudayaan. Mao meninggal tidak lama kemudian, dan atas desakan Deng Xiaoping dengan bantuan militer, Hua Guofeng menangkap para anggota GoF. Pada akhir 1976, RRC telah dikuasai oleh sebuah rezim baru yang lebih moderat.¹⁹

Hidup Para Hoaqiao Asal Indonesia Selama Revolusi Kebudayaan 1966-76

Beberapa literatur (mis. Godley 1989) menyatakan bahwa para Huaqiao asal Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mengalami banyak tekanan selama Revolusi Kebudayaan. Karena para Hoaqiao rata-rata memiliki profesi pedagang atau penyedia sektor jasa di negeri asal, mereka kerap dicurigai memiliki karakter kapitalis atau borjuis. Selain itu, mereka dianggap tercemar pikirannya oleh pengalaman hidup dalam negeri kapitalis (seperti Indonesia, Malaya) maupun gaya hidup materialistik yang tercemar kapitalisme. Hal ini semakin diperparah ketika 'musim semi' hubungan Indonesia - RRC berakhir dengan naiknya rezim Orde Baru pada tahun 1966 yang anti-komunis. Ini disusul dengan pemutusan hubungan diplomatik secara sepihak oleh Indonesia pada bulan Oktober 1967. Para hoaqiao mengalami tekanan baik dalam pergaulan sosial (seperti dimukimkan secara terpisah dari penduduk RRC lainnya dan larangan untuk menduduki posisi-posisi penting/strategis dalam partai atau dalam komune) maupun secara kultural (mereka dilarang memakai bahasa selain bahasa Mandarin, dilarang mempraktekkan seni budaya daerah asal, dan dilarang berbicara tentang kehidupan masa lalu di daerah asal). Selama Revolusi Kebudayaan, para

¹⁹ Gao Wenqian, 2007. *Zhou Enlai: The Last Perfect Revolutionary - A Biography*. New York: Public Affairs.

hoaqiao sering diincar oleh para Pengawal Merah. Kenyataan bahwa mayoritas para hoaqiao masih berada dalam proses belajar bahasa Putonghoa dijadikan alasan bagi para Pengawal Merah untuk meragukan ‘kecinaan’ maupun loyalitas para hoaqiao terhadap negeri mereka yang ‘baru’. Di beberapa daerah, para hoaqiao dipaksa untuk membuat otokratik dan menulis otobiografi untuk menunjukkan ‘dosa-dosa’ mereka hidup dalam sistem kapitalis di negeri asal.²⁰ Namun, analisis Godley (1989) tidak sepenuhnya benar. Pak James Wong, yang bersekolah setingkat SMA dengan para hoaqiao lainnya di Hubei, memang mengakui bahwa pada awalnya sekolah mereka diserbu para Pengawal Merah. Namun, yang terjadi adalah bahwa para siswa hoaqiao kemudian diajak ke dalam aksi-aksi Pengawal Merah untuk membuktikan loyalitas mereka pada RRC dan Ketua Mao.²¹ James Wong juga berpendapat bahwa perlakuan baik yang diperoleh para hoaqiao di beberapa tempat ada kaitannya dengan usaha pemerintah RRC untuk menjadikan mereka sebagai model integrasi positif para hoaqiao di bawah sistem komunis.

Pengalaman para hoaqiao di Yingde juga menjadi indikasi bahwa perlakuan terhadap para hoaqiao sangat dipengaruhi oleh sentimen dan karakter kepemimpinan di masing-masing komune.

Para Pengawal Merah mulai memasuki Yingde (dari Guangzhou) pada pertengahan 1966. Sebagian besar para hoaqiao di Yingde pada tahun 1966 belum terlalu fasih berbahasa Putonghoa maupun membaca dan menulis huruf kanji. Meski ada larangan resmi bagi para hoaqiao untuk menggunakan bahasa Melayu, Jawa atau Indonesia, Kawan Liu sebagai Ketua Komune (*Zhang Jang* / Kepala Perkebunan) tidak pernah melaporkan kepada partai atau para Pengawal Merah kenyataan bahwa para hoaqiao di bawah kepemimpinannya masih menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa dalam percakapan sehari-hari. Menurut Pak Gunawan, di sela-sela pekerjaan di kebun teh, para hoaqiao sering berkumpul dan bernyanyi-nyanyi lagu pop Indonesia yang mereka ingat seperti ‘Sarinande’, ‘Ajo Mama’ atau ‘Potong Padi’ dan ‘Potong Bebek’. Kawan Liu biasanya secara persuasif mengingatkan agar dinyanyikan pelan-pelan saja supaya tidak terdengar oleh para anggota partai atau para Pengawal Merah.

²⁰ Lihat Godley, M.R., 1989. “The Sojourners: Returned Overseas Chinese in the People’s Republic of China”

²¹ Wawancara dengan James Wong, Hong Kong, Desember 2011.

Anak-anak para hoaqiao juga berhenti bersekolah karena mereka diharuskan ikut dalam kegiatan-kegiatan *long march* yang diorganisir oleh para Pengawal Merah. Salah satu Ibu (?) di Yingde mengingat bagaimana sebagai anak berumur 12 tahun dia diharuskan untuk ikut *long march* dengan kawan-kawan sebayanya (dalam organisasi Pionir) hingga ke Guangzhou selama beberapa minggu. Bagi mereka, ini adalah kegiatan baru yang cukup seru. Sambil membawa panji-panji, bendera dan buku merah Mao mereka mampir di desa-desa dan menyanyikan lagu-lagu tentang Mao.²²

Satu kasus serius yang menimpa seorang hoaqiao di Yingde menimpa Pak Gunawan. Sebelum revolusi kebudayaan, dia pernah mengeluhkan nasib para hoaqiao di Yingde dan memutuskan untuk menulis sebuah surat yang konon dialamatkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa. Tindakan ini rupanya diketahui oleh para anggota partai dan para Pengawal Merah di Yingde (karena surat-surat yang dialamatkan ke luar negeri pada periode ini biasanya disensor), dan dikombinasikan dengan ‘dosa-dosa’ dia yang lain (seperti selalu bernyanyi dalam bahasa Indonesia, foto dirinya dalam pose ‘kapitalistik’ a la Elvis sewaktu dirinya masih main band sekolah di Semarang), Gunawan yang waktu itu berumur 26 tahun dipanggil dalam sebuah rapat komune. Di pusat komune sudah digantungkan sebuah spanduk bertuliskan dalam kanji “*Chen Zhen De Liu Mang Yinni*” (“Chen Zhen De, Bajingan Indonesia!”) dan para Pengawal Merah silih berganti berpidato di depan warga komune mengutuk semua ‘dosa-dosa’ dia. Semua orang dipanggil ke mimbar untuk ikut mengutuk Gunawan, dan kemudian Gunawan diarak secara paksa berkeliling. Sesudah itu, selama tiga bulan Gunawan harus menuliskan otokritik dan otobiografi untuk mengakui ‘dosa-dosa’nya. Karena belum fasih menulis dalam kanji, sebagian besar pengakuan dia tulis dalam bahasa Indonesia dan Jawa.²³

Para hoaqiao di Yingde juga kerap melakukan perlawanan secara pasif selama Revolusi Kebudayaan berlangsung. Mereka kerap menyanyikan lirik-lirik lagu revolusioner RRC (dalam bahasa Putonghoa) dalam alunan melodi lagu-lagu pop Indonesia seperti ‘Impian Semalam’, ‘Bengawan Solo’ atau lagu-lagu perjuangan seperti ‘Halo Halo Bandung’, ‘Maju Tak Gentar’. Selain itu, ada juga yang nekat mengolok-olok para Pengawal Merah dengan menulis kata ‘Ojo Dumeh’ pada pantat

²² Interview dengan Ibu (?) di Yingde, Guangdong, Desember 2011.

²³ Wawancara dengan Pak Gunawan (Chen Zhen De), Yingde, Guangdong, Desember 2011.

celana mereka selama bekerja.²⁴ Tekanan sosial dan politik selama Revolusi Kebudayaan juga mengakibatkan banyaknya hoaqiao, terutama laki-laki yang belum berkeluarga, yang melarikan diri ke Hong Kong. Ini bisa ditempuh dengan berpura-pura meminta izin bepergian ke Guangzhou untuk alasan yang dibuat-buat. Dari Guangzhou mereka berenang atau berakit di malam hari untuk mencapai New Territories di wilayah Hong Kong.²⁵

Selama Revolusi Kebudayaan, para hoaqiao dilarang mengekspresikan opini-opini yang bersifat pribadi, dan di depan umum, mereka akan selalu menjaga perkataan mereka agar terlihat sesuai dengan sikap-sikap ideal yang diajarkan oleh Ketua Mao. Di samping itu, mereka akan menghindari pemakaian bahasa Jawa atau Indonesia jika ada orang lain. Dampak terpenting dari Revolusi Kebudayaan adalah bahwa masa ini mempercepat integrasi para hoaqiao menjadi 'orang Cina'. Ketatnya aturan-aturan yang diterapkan para Pengawal Merah mempercepat proses para hoaqiao mempelajari bahasa Putonghoa (Mandarin) dan mempelajari ideologi Mao maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kedatangan Hoaqiau Asal Indonesia Gelombang Kedua (1966-67)

Penduduk Yingde bertambah ketika pada tahun 1966-1967 muncul rombongan pengungsi Tionghoa dari Sumatra yang mengalami ketidakpastian hidup, bahkan tindak kekerasan, pada masa pasca-G30S. Warga Tionghoa dituduh sebagai simpatisan PKI / komunis (mengingat hubungan mesra RRC dengan PKI sejak 1963). Satu rombongan pendatang pengungsi adalah mereka yang berasal dari Aceh, seperti Banda Aceh, Takengeun, Lhokseumawe dan Meulaboh. Menurut penuturan Pak Lemper (Goh Kian Nam / Wu Jien Nam), rumah-rumah toko Tionghoa di Takengeun dilempari kotoran manusia oleh para pemuda yang tergabung dalam KAMI/KAPPI yang diduga berasal dari Medan. Pembunuhan spontan terhadap warga Tionghoa oleh masyarakat pribumi terjadi meluas di Indonesia antara Oktober 1966 hingga Oktober 1967.²⁶

²⁴ Wawancara dengan Pak Gunawan (Chen Zhen De), Yingde, Guangdong, Desember 2011.

²⁵ Wawancara dengan James Wong, Hong Kong, Desember 2011.

²⁶ Kekerasan terhadap para etnis Tionghoa di Medan pada mas ini menjadi salah satu fokus film Jagal (*The Act of Killing*) yang disutradarai Joshua Oppenheimer (2013).

Hoaqiau dan Konteks RRC 1976 - 1989

Konteks Perubahan Politik RRC 1976-1989

Wafatnya Mao pada tahun 1976 dan naiknya Hua Guofeng sebagai Sekretaris Jenderal PKC membuka peluang bagi para reformis seperti Deng Xiaoping. Deng Xiaoping berhasil menggeser kedudukan Hua Guofeng, dan pada tahun 1978 dia menjadi pemimpin RRC yang paling berpengaruh, meski jabatannya adalah Perdana Menteri, jabatan yang dalam hirarki PKC masih di bawah Ketua (Sekretaris Jenderal) PKC. Pada tahun 1979 Deng Xiaoping berkunjung ke Amerika Serikat, dan mencanangkan dimulainya era keterbukaan ekonomi RRC pada investor asing. Di dalam negeri, Deng Xiaoping melalui ucapannya '*it's good to be rich*' memberi restu bagi rakyat untuk ikut mendorong tumbuhnya ekonomi pasar di RRC untuk menggantikan sistem ekonomi sosialis yang terpusat. Aktifitas perdagangan dalam skala kecil-kecilan diperbolehkan, dan retorika ideologi yang begitu kuatnya di era Mao perlahan-lahan diperlonggar.

Untuk mendorong arus investasi asing ke RRC, Deng Xiaoping menjadikan Guangzhou pada tahun 1980 sebagai wilayah '*special economic zone*' yang terbuka bagi investasi asing. Di samping itu, berbagai kota pesisir seperti Shanghai juga dirancang menjadi pusat pasar finansial. Satu proyek khusus Deng Xiaoping adalah perubahan wilayah Shenzhen dari sebuah areal pertanian terkebelakang menjadi sebuah kota industri baru. Secara terbatas, Deng Xiaoping mengizinkan arus urbanisasi dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan, terutama untuk mereka yang memiliki skill yang diperlukan wilayah-wilayah industri baru ini. Deng Xiaoping pada tahun 1980 juga mengirim kader-kader berbakat untuk belajar manajemen ke luar negeri seperti ke Singapura.

Keterbukaan ekonomi di era Deng Xiaoping tidak diiringi oleh keterbukaan dalam bidang politik. PKC tetap mempertahankan kekuasaan tunggalnya dan hanya memperbolehkan kritik-kritik terbatas terhadap jalannya pemerintahan. Akses informasi untuk sebagian besar rakyat masih dibatasi siaran-siaran resmi radio maupun televisi pemerintah. Peran negara masih dominan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyatnya.

Era keterbukaan ekonomi ini menyebabkan menjalarnya praktek korupsi di antara banyak fungsionaris PKC dari pusat hingga daerah. Ketidakpuasan rakyat akan praktek-praktek korupsi ini semakin dirasa dengan meninggalnya tokoh PKC yang paling reformis, bersih dan demokratis, Hu Yaobang. Selama berminggu-minggu mahasiswa Universitas Beijing melakukan aksi duka atas meninggalnya Hu Yaobang. Aksi ini lama-lama berkembang menjadi protes pro-demokrasi yang kemudian menjalar ke hampir semua kota besar di RRC (terutama Shanghai, Guangzhou). Protes kemudian ditumpas oleh pemerintah RRC melalui kekerasan (Insiden Tiananmen II) dan menjadi awal dari jatuhnya kekuasaan Deng Xiaoping.

Adaptasi para Hoaqiao di Yingde terhadap perubahan di era Deng Xiaoping

Satu hal terpenting yang dirasakan para hoaqiao di Yingde adalah terbukanya kesempatan bagi mereka untuk memulai usaha kecil-kecilan. Pak Lemper mulai mencoba membuat lempeng, onde-onde (*chientoi*) dan kue lapis (*chi chienkao*) untuk dijual ke sesama hoaqiao dan warga asli Hakka diseperti Yingde. Para hoaqiao masih ingat bahwa kesempatan pertama untuk memasak masakan Indonesia, meski dengan bahan-bahan terbatas, mulai dilakukan pada tahun 1976 seiring dengan dilonggarkannya alokasi kuota produksi pertanian di komune Yingde. Terbukanya perdagangan swadaya kecil-kecilan dan diperbolehkannya para hoaqiao untuk menanam tanaman sesuai keinginan di atas tanah pemerintah juga memungkinkan para hoaqiao untuk memperoleh jenis tanaman dan bumbu-bumbuan yang dibutuhkan tidak hanya untuk membuat lempeng, tapi juga untuk kembali dapat memasak masakan-masakan Indonesia yang selama ini tidak dapat mereka buat.

Melonggarnya retorika-retorika ideologi juga memungkinkan para hoaqiao untuk kembali mengekspresikan budaya asal mereka, seperti berbicara secara terbuka dalam bahasa Jawa / Indonesia dan menyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Indonesia.

Sementara itu, generasi ketiga (atau generasi yang lahir di Yingde) mulai bisa mencari karier di luar komune jika skills dan spesialisasi kerjanya berguna di tempat lain. Di beberapa wilayah, beberapa keluarga hoaqiao yang tidak betah untuk meneruskan hidup di Cina diperbolehkan untuk mengajukan permohonan agar diperbolehkan untuk beremigrasi ke luar RRC seperti Hong Kong (meski banyak yang harus

memakai alasan ‘ingin kembali ke Indonesia’ karena pemerintah RRC hanya akan mengabulkan permohonan keluar RRC untuk kepentingan reunifikasi keluarga di tempat asal).²⁷ Di era ini, pemerintah RRC juga secara aktif mendorong rakyat untuk menabung di bank-bank milik pemerintah, meski hanya berlaku untuk mereka yang sudah berusia produktif (umur 18 ke atas).

Akses informasi ke dunia luar dapat diperoleh para hoqiao dengan diam-diam mendengarkan siaran radio gelombang pendek (SW) dari luar negeri yang sebenarnya masih dilarang. Longgarnya pengawasan sosial oleh kader partai memungkinkan para hoqiao untuk secara teratur mendengar siaran Radio Australia (ABC) dari Melbourne (dalam bahasa Indonesia) maupun siaran radio dari Taiwan (dalam bahasa Mandarin).

Hoqiao dan Konteks RRC 1992 - 2000

Konteks RRC 1992 - 2000

Peristiwa Tiananmen 1989 menyadarkan para petinggi PKC bahwa hanya penyelesaian ekonomi yang dapat menjawab ketidakpuasan politik rakyat. Sebagai akibatnya, dekade 1990an adalah awal dari percepatan penerapan sistem pasar bebas di Cina, meski subsidi-subsidi kebutuhan pokok dalam bentuk kupon masih diberlakukan untuk wilayah-wilayah pedalaman/pedesaan. Mobilitas pekerja yang amat dibutuhkan pertumbuhan perekonomian di wilayah pesisir dan pedalaman menyebabkan sistem Hukou tidak lagi diterapkan secara ketat. Rakyat RRC diberi kebebasan mobilitas, meski mereka tetap memerlukan paspor untuk memasuki Hong Kong (yang menjadi bagian dari RRC sejak 1997) atau Macau (yang menjadi bagian dari RR sejak 1999).

Pemerintah RRC juga mulai membebaskan kepemilikan pribadi bagi rakyat, seperti motor, televisi, mobil, hingga tanah dan rumah. Salah satu implikasi adalah bahwa ketimpangan sosial antara kaya dan miskin mulai tumbuh dalam dekade 1990-an. Pemerintah juga mulai membuka peluang bagi peran serta swasta dalam proyek-proyek pembangunan. Akses informasi mulai mengalami diversifikasi. Stasiun TV CCTV mulai memperbanyak siaran tentang dunia luar, dan semenjak akhir 1990-an,

²⁷ Informasi dari Richard Oh, Jakarta, April 2012. Sepasang suami isteri anggota keluarga Richard Oh berhasil mengajukan permohonan untuk keluar RRC dan pindah ke Hong Kong.

koneksi internet mulai dapat dinikmati oleh para pengguna awam. Penggunaan HP genggam mulai meluas semenjak awal 2000-an.

Implikasi bagi para Hoaqiao di Yingde

Tahun 1990an adalah era ketika interaksi antara Yingde dengan wilayah perkotaan semakin meluas. Generasi ketiga dari para Hoaqiao ada yang sudah bekerja di Shenzhen, Guangzhou dan kota-kota pesisir lainnya.

Pada dekade ini, TV menjadi barang yang sudah dinikmati hampir setiap rumah, dan informasi tentang Indonesia melalui TV mulai muncul, meski berita terbesar pertama tentang Indonesia adalah pembukaan kembali hubungan diplomatik RI dengan RRC (1990, yang masih ditonton dengan TV milik komune), dan lebih terpenting, kerusuhan Mei 1998 yang memberikan gambaran yang cukup suram bagi para hoaqiao tentang nasib para hoaqiao yang masih berada di Indonesia.

Terbukanya akses dengan Indonesia, antara lain melalui semakin banyaknya pengunjung RRC ke Indonesia (dan sebaliknya) semenjak akhir 1990an, dan juga kemudahan bepergian ke Hong Kong, semakin memudahkan akses bagi para hoaqiao untuk memperoleh barang-barang dari Indonesia, seperti bumbu masakan (sambal, dsb) maupun item-item kesenian.

Kontak para hoaqiao dengan Konsulat Jenderal Ri di Guangzhou maupun Kedutaan Besar R.I. di Beijing semakin intensif dengan dilibatkannya para hoaqiao Yingde dalam banyak acara kebudayaan yang diseleenggarakan oleh KBRI maupun Konjen RI. Pada tahun 2008 Konjen RI menyumbang seperangkat alat musik angklung dan beberapa kostum lainnya untuk dipakai komunitas hoaqiao Yingde. Pengajaran kebudayaan Indonesia tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan nostalgia kaum tua (generasi pertama dan kedua), tapi juga diajarkan di sekolah negeri yang ada di Yingde supaya generasi keempat hoaqiao mengenali asal-usul tempat asal keluarga mereka.²⁸

Catatan Tentang Konstruksi Identitas Hoaqiau asal Indonesia

Kategorisasi Suryadinata (1992) cenderung mengabaikan variasi maupun dinamika konteks konstruksi identitas para etnis Tionghoa di Indonesia, dan ini sulit untuk

²⁸ Interview dengan Ibu Weilan, Yingde, Guangdong, Desember 2011.

dipakai dalam membingkai maupun memahami konstruksi identitas para informan Guiqiao asal Indonesia yang dijumpai di Guangdong. Dilihat dari masa tinggal di Indonesia, kebanyakan Hoaqiao asal Jawa yang memilih 'pulang' ke RRC pada tahun 1960 adalah generasi pertama dan/atau kedua yang cenderung akan digolongkan sebagai *Cina Totok* oleh Suryadinata. Meski generasi pertama memiliki karakteristik *totok*, generasi kedua justru memiliki karakteristik *peranakan* karena tidak lagi bisa berbahasa Cina (baik dialek maupun Putonghoa/Mandarin) dan memiliki identifikasi kultural yang lemah dengan Cina. Sebagai contoh, Ayah Gunawan Chen, seorang Tionghoa generasi pertama, adalah seorang Hokkien yang datang pada tahun 1920-an sebagai pedagang dari Cina ke Jawa Tengah. Gunawan Chen sendiri, sebagai generasi kedua, dibesarkan di Kuwu, Grobogan dalam alam bahasa dan budaya Jawa setempat. Pendidikan yang ditempuh adalah pendidikan Katholik pada SD/SMP/SMA Loyola di Semarang yang diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, dan dia memilih untuk menganut agama Katholik. Kedua orangtuanya hanya mengajarkan beberapa kata Hokkien yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh anak-anak Hoaqiao se-generasinya.²⁹ Dua informan lainnya seperti Pak Panut (asal Wonosari) dan Pak Sie (Xu Yao Zhong, asal Jepara) juga menganggap bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan kedua.³⁰

Pak Sip adalah generasi kedua orang Hakka yang menetap di Bangka. Ayah Pak Sip datang dari Kwantung (Guangdong) ke Bangka pada tahun 1924 sebagai buruh tambang timah. Berbeda dengan kondisi di Jawa, bahasa Hakka adalah bahasa yang secara luas dipergunakan di Bangka, dan sebagai akibatnya, Pak Sip lebih fasih berbicara bahasa Hakka dibandingkan bahasa Melayu.

Para Huaqiao asal Indonesia gelombang kedua (1966-67) dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang terpaksa mengungsi akibat tekanan-tekanan politik pasca-G30S (1965-67) di Indonesia ketika banyak keturunan Tionghoa dicap sebagai simpatisan PKI/RRC. Di Yingde, kelompok ini berasal dari Sumatra, khususnya wilayah Sumatra Utara dan Aceh. Pak Lemper (Goh Kian Nam/Wu Jien Nam) dan Ibu Wei Lan adalah dua warga Ying De yang datang pada tahun 1967 dari Takengeun, Aceh. Keduanya juga mengaku bahwa di Indonesia

²⁹ Wawancara dengan Tjen A Sip, Yingde, Guangdong, Desember 2011.

³⁰ Wawancara dengan Sie Ju Tjong (Xu Yao Zhong) dan Pak Panut, Yingde, Guangdong, Desember 2011.

mereka dibesarkan dalam alam bahasa Melayu karena bertetangga dengan orang Aceh, Gayo dan etnis-etnis pribumi lainnya.³¹

Dalam kelompok kedua adalah mereka yang diberangkatkan secara individual, pada umumnya siswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga kelas menengah yang dikirim untuk belajar ke RRC di tengah ketidakpastian nasib maupun diskriminasi anti-Cina yang sedang meluas di Indonesia di masa-masa awal Orde Baru. Karena berangkat secara individual untuk tujuan sekolah, mereka tidak ditempatkan ke komune-komune pertanian seperti di Yingde. Pak James Wong, sebagai contoh, berangkat dari Banyuwangi (Jawa Timur) pada tahun 1966 untuk bersekolah. Karena dibesarkan di lingkungan berbahasa Jawa, masa-masa awal studinya di Sekolah Khusus untuk para Guiqiao (Hoaqiao yang telah 'kembali') di Provinsi Hubei difokuskan untuk belajar bahasa Putonghoa (Mandarin).³² Dengan demikian, mayoritas guiqiao di Yingde yang lahir di Indonesia tidak dapat berbahasa Cina (Putonghoa/Mandarin) ketika mereka masih berada di Indonesia.

Para Hoakiau di Yingde memiliki identifikasi dengan Indonesia yang bersifat generik. Mereka pada umumnya mengenang Indonesia sebagai tempat kelahiran, tempat mereka dibesarkan dan tempat di mana banyak keluarga masih 'tertinggal'. Mereka selalu mengenang Indonesia melalui romantisme pada iklim, makanan, lagu-lagu pop maupun bahasa (Indonesia maupun bahasa lokal) - dan tidak mengenang Indonesia sebagai sebuah identitas resmi (mis. kewarganegaraan) atau pun keIndonesiaan sebagai identitas tunggal (seperti 'nasionalisme'). Kekerasan simbolik maupun fisik yang mereka alami di Indonesia, terutama dari pihak militer dan pemerintah, dengan jelas menunjukkan bagi mereka bahwa mereka tidak diberi tempat dalam 'nation' Indonesia sebagai anggota bangsa (sebuah citra yang tetap ada, terutama setelah mereka menyaksikan kekerasan terhadap hoaqiao di Indonesia hingga Mei 1998).

Di sisi lain, proses penyesuaian untuk tinggal di Cina maupun proses indoktrinasi untuk menjadi warga dari RRC dalam kurun waktu lebih dari empat dekade telah dilalui dengan susah payah (terutama di era Mao hingga 1976) sehingga pada

³¹ Wawancara dengan Pak Lemper (Goh Kian Nam/Wu Jien Nam) dan Ibu Wei Lan, Yingde, Guangdong, Desember 2011.

³² Wawancara dengan Pak James Wong, Hong Kong, Desember 2011.

akhirnya mereka telah menerima realita bahwa mereka adalah orang Tionghoa yang selayaknya menjadi warganegara yang loyal pada RRC. Terlebih lagi bagi generasi turunan ketiga maupun keempat yang lahir dan dibesarkan di RRC, Indonesia adalah sesuatu yang jauh dan abstrak.

Seluruh proses ini menjadi sebab mengapa mayoritas *guiqiao* generasi pertama di Yingde tetap mempertahankan beragam kebiasaan (bahasa, pola makan) dari Indonesia namun tidak memilih untuk kembali menetap permanen ke Indonesia (setelah kemungkinan itu terbuka sejak 1990an), atau pun untuk menerima kesempatan ‘pulang ke Indonesia’ yang ditawarkan Konsulat RI di Guangzhou pada tahun 2008.

Bibliografi

Li, Wei & Dennis Tao Yang (2005). *The Great Leap Forward: Anatomy of a Central Planning Disaster*. *Journal of Political Economy* 113 (4), pp. 840-877.

MacFarquhar & Schoenhals. 2006. *Mao's Last Revolution*. Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.

Mobo Gao, 2008. *The Battle for China's Past: Mao and the Cultural Revolution*. London: Pluto Press.

Mozingo, D.1976. *Chinese Policy toward Indonesia, 1949-1967*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Suryadinata, Leo. 1992. *Pribumi, Indonesians, the Chinese Minority and China*. 3rd ed. (orig. 1978). Singapore: Heinemann Asia.